

**KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA POPAYA KECAMATAN DENGILLO
KABUPATEN POHUWATO**

**OLEH
ROSTIN DETU
NIM :S2115176**

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

**KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA POPAYA KECAMATAN DENGILO
KABUPATEN POHUWATO**

**OLEH
ROSTIN DETU
NIM :S2115176**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar kesarjanaan
Pada tanggal2021**

PEMBIMBING 1


**Dr. Dra.Hj.Rusni Djafar,MPA
NIDN : 0901036601**

PEMBIMBING II


**H.Umar Sune, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0902076801**

Mengetahui ;

**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dn Ilmu Politik**



**Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN: 0924.0767.01**

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA POPAYA KECAMATAN DENGILLO KABUPATEN POHUWATO

OLEH :

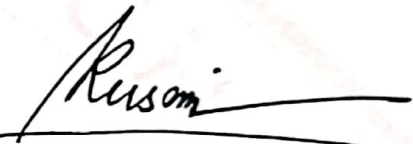




ROSTIN DETU

NIM :S2115176

Telah memenuhi syarat dan dipertashankan pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Pada tanggal,.....2021

Komisi Penguji ;

1. Dr. Dra. Hj. Rusni Djafar, MPA
2. H. Umar Sune, S.Sos.,M.Si
3. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
4. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
5. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

MENGETAHUI

Dekan,
Fakultas Sospol

Almar, S.Sos.,M.Si
NIDN:0913.0786'02

Ketua Program Studi
Hum. Pemerintahan

Darmawati, Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN: 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sangsi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini

Gorontalo, 2021



Rostin Detu
Nim :S2115176

ABSTRAK

ROSTIN DETU, S211517, Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato

Permasalahan dalam penelitian adalah “Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato”, berdasarkan pengamatan sementara penulis Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato menunjukkan belum maksimalnya kinerja kepala desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa. Tujuan Penelitian yakni untuk mengetahui Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, Obyek penelitian adalah Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, sedangkan desain penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan informan penelitian 15 orang informan.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1. Kinerja Kepala Desa Popaya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan melalui koordinasi pemberdayaan masyarakat menunjukkan telah melalui pelibatan masyarakat baik dalam proses awal kegiatan maupun akhir kegiatan pembangunan. Pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pemeliharaan proyek kemasyarakatan yang telah berhasil dikoordinasikan oleh kepala Desa Popaya kecamatan Dengilo masih perlu ditingkatkan dengan lebih banyak melibatkan masyarakat desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. 2. Kinerja Kepala Desa dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa telah melakukan melalui pendekatan komunikasi dengan semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur terutama yang terkait langsung dengan kegiatan dimaksud yakni Satuan kerja, bidang Kantibmas serta elemen keamanan yang ada di Desa Popaya yakni Binmas dan bagian Trantib Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. 3. Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur melalui koordinasi penerapan dan penegakan peraturan, dimana Kepala desa telah berusaha sedapat mungkin dalam pelaksanaan pembangunan tersebut senantiasa melakukan dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan, Upaya yang terpenting telah dilakukan melalui proses awal kegiatan melalui usaha musyawarah Desa yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang berdasarkan Pembangunan Nasional tahun 2004. Mekanisme yang dilaksanakan mendapatkan perhatian semua unsur masyarakat yang dihadirkan dalam kegiatan musyawarah sehingga menghasilkan perencanaan yang berasal dari usulan masyarakat yang dibutuhkan bukan hanya karena kepentingan orang perorang saja. Hal ini masih harus ditingkatkan pada masa – masa yang akan datang sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Popaya benar-benar dirasakan manfaatnya.

Kata Kunci : Kinerja - Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

ROSTIN DETU, S211517, Performance of the Village Head in Infrastructure Development of Popaya Village, Dengilo District, Pohuwato Regency

The problem in this research is "The Performance of the Village Head in Infrastructure Development of Popaya Village, Dengilo District, Pohuwato Regency", based on the author's temporary observation of Popaya Village Infrastructure Development, Dengilo District, Pohuwato Regency, which shows that the performance of the village head in implementing village infrastructure development. The research objective is to determine the performance of the village head in infrastructure development Popaya Village, Dengilo District, Pohuwato Regency, The object of research is the Performance of the Village Head in Infrastructure Development of Popaya Village, Dengilo District, Pohuwato Regency. This research was carried out for approximately 2 months, while the research design, the authors used qualitative methods, with 15 informants.

The results of the study show that: 1. The performance of the Popay Village Head in coordinating the implementation of development through coordination of community empowerment shows that he has gone through community involvement both in the initial process of development activities and at the end of development activities. Empowerment through community participation in the implementation and maintenance of community projects that have been successfully coordinated by the village head of Popaya village, Dengilo sub-district, still needs to be improved by involving more community members in Popaya village, Dengilo sub-district, Pohuwato district. 2. The performance of the Village Head in coordinating efforts to maintain peace and public order can be concluded that the Village Head has carried out a communication approach with all related elements in the implementation of infrastructure development, especially those directly related to the activities in question, namely the work unit, the Kantibmas field and security elements involved. in Popaya Village, namely Binmas and the Trantib section of Popaya Village, Dengilo District, Pohuwato Regency. 3. The performance of the village head in the implementation of infrastructure development through coordination of the implementation and enforcement of regulations, where the village head has tried as much as possible in the implementation of the development, always carrying out the applicable provisions and in accordance with the applicable regulations in the administration of government, development and society, the most important effort has been carried out through the initial process of activities through a village deliberation effort called the Village Development Planning Deliberation based on the 2004 National Development. The mechanism implemented has received the attention of all elements of the community presented in the deliberation activities so as to produce plans derived from community proposals that are needed not only because of the interests of the community. individual only. This still has to be improved in the future so that the implementation of infrastructure development in Popaya Village can really benefit from it.

Keywords: Performance - Infrastructure Development

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Keterlambatan melakukan bukan berarti telah gagal meraih sukses, tetapi perjalanan membutuhkan proses yang matang.

(Rd)

PERSEMBAHAN :

Karya sederhana ini sebagai dharma bhaktiku kepada :

Kedua orang tuaku ibunda tercinta (Meti Majadi) dan Ayahanda tercinta (Juma Detu) yang begitu sangat berarti mereka dalam hidupku

Kakak dan Adik-adiku yang senantiasa mendambakan kesuksesanku

Suamiku tercinta (Meldi Sabunge) yang begitu gigih memberikan dukungan atas keberhasilanku

Spesial si kecil anakku tersayang yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku.

**Almamaterku Tercinta
Tempat aku menimba ilmu
Universitas Ichsan Gorontalo**

DAFTAR TABEL

Tabel : 4.1 Periode Kepemimpinan Kepala DesaSetelah Berdirinya	
Desa Popaya.....	24
Tabel : 4.2 Sejarah Pembangunan Desa.....	25
Tabel : 4.3 Demografi.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir.....	18
----------------------------------	----

KATAPENGANTAR

Sebagai Hamba yang lemah patutlah memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang MahaEsa karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu masukan dan arahan dari berbagai pihak, pembimbing, serta pihak lembaga dimana penulis menuntut ilmu.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengethuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Arman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Ichsan Gorontalo

4. Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Hj. Rusni Djafar, MPA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak H. Umar Sune, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini
7. Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak membantu penulis.
8. Kedua Orang Tua Penulis yang selama ini dengan segala keikhlasan dan ketulusan untuk membantu secara materil dan moril demi kesuksesan anaknya.
9. Spesial suami penulis yang sudah menemani dalam segala keadaan
10. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang selalu memberi motivasi atas selesainya penulisan Skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	
PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Kinerja.....	7
2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.....	7
2.3. Penilaian Kinerja.....	11
2.4 Pembangunan Infrastruktur Desa.....	13

2.5. Kerangka Pikir.....	16
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Objek Penelitian.....	19
3.2. Desain Penelitian.....	19
3.3 Operasionalisasi Variabel.....	20
3.4. Informan Penelitian	20
3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	21
3.6. Teknik Pengumpulan data.....	21
3.7. Analisis Data.....	22
BAB IV Hasil Penelitiandan Dan Pembahasan.....	23
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Popaya Kecamatan Dengilo.....	23
4.1.2 Visi dan Misi Desa Popaya Kecamatan Dengilo.....	27
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Popaya.....	28
4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pemerintah Desa Popaya.....	29
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	33
4.3. Pembahasan	40
BAB V PENUTUP.....	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi pemerintah. Organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan.

Organisasi tersebut harus mengelolah berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanakan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia (*humanbeing*) yang bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan banyak tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut. Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pegawai birokrasi pemerintahan daerah sebagai personifikasi pemerintahan yang kita kenal selama ini adalah menampilkan profesionalisme dan mandiri dalam

pelayanan publik. Proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang mengalami pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi.

Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, yang di tandai dengan semakin terbentuknya masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah.

Birokrasi sedang bergeser dari paradigma sentralistik ke desentralistik, dari otoritarian keegalitarian dan demokratis, dari kedaulatan Negara ke kedaulatan rakyat, dari organisasi yang besar menjadi ramping tapi kaya fungsi, dari *rowing* (semua dikerjakan sendiri) menjadi *stering* (mengarahkan). Upaya-upaya tersebut masih dibayangi oleh ketidakpastian dan sedang mencari bentuk yang tepat. Pada dasarnya upaya tersebut diarahkan untuk mendapatkan dukungan administrasi negara yang mapan mengenai kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi dalam mewujudkan administrasi yang makin handal, professional, efisiensi, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan.

Salah satu gejala yang tampak dalam proses pergeseran ini adalah makin meningkatnya perhatian aspek budaya dalam studi organisasi. Tidak hanya sebagai salah satu bagian penting dalam studi organisasi, tetapi konsep budaya dipergunakan sebagai metafora untuk menjelaskan perwujudan dan hakekat organisasi. Penggunaannya dalam analisis organisasi, budaya tidak hanya

dipandang sebagai sesuatu yang ada dan hidup dalam suatu organisasi, tetapi juga sesuatu yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dalam pemahaman organisasi. Sebagai suatu variabel dalam organisasi, budaya dipelajari sebagai bagian dari sistem organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, budaya dilihat sebagai sesuatu yang hidup di suatu organisasi yang mengikat semua anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Budaya juga dapat dilihat sebagai bagian dari suatu lingkungan organisasi yang mempengaruhi perilaku dan penampilan (*performance*) organisasi. Analisis terhadap kinerja birokrasi publik menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis.

Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Oleh karena itu kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Terbatasnya informasi mengenai kinerja aparatur terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting sehingga tidak jarang ditemukan dalam perekrutan suatu jabatan yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan serta kompetensi pimpinan serta masih melekatnya budaya paternalisme. Secara mental setiap aparat birokrasi, masih

ditemukan adanya tradisi dan tata pergaulan yang bersifat paternalisme, misalnya dihadapan pimpinan dinas, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukkan penolakannya atas suatu ide atau gagasan pimpinan.

Penolakan atas ide pimpinan secara terbuka dapat berarti membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya. Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur diakibatkan oleh kinerja aparat birokrasi masih relatif rendah. Hal ini dapat ditunjukkan pada kondisi riil yang ada yakni manakala Pimpinan melakukan Tugas (Dinas) Luar, maka ada anggapan bahwa tugas dan tanggung jawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya atau dengan kata lain bawahan selalu menunggu pimpinan kembali untuk meminta petunjuk kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas bawahan senantiasa harus dalam pengawasan langsung pimpinan.

Pada tataran inilah dirasakan faktor kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah mencetuskan Desa/kelurahan merupakan wilayah kerja kepala Desa/lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk sosok aparat pemerintah yang ideal sesuai dengan tuntutan saat ini. Namun kenyataannya keluhan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan dalam

melayani kerap kali mewarnai proses hubungan antara yang melayani dengan yang dilayani. Fenomena yang hampir dapat dijumpai pada berbagai instansi pemerintah, tidak terkecuali juga dijumpai di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, Desa Popaya yang menjadi objek dalam penelitian ini. Atas dasar latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :*Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini: “ Bagaimana Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian “ Untuk mengetahui Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi sebagai tambahan literatur ataupun wawasan mengenai pembangunan infrastruktur desa.
2. Bagi praktisi sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja terutama dalam pembangunan infrastuktur desa, agar lebih baik ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kinerja

Secara sederhana, kinerja adalah prestasi kerja. Gomes (1999) mendefinisikan kinerja (performance) sebagai catatan hasil (outcomes) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com).

Berbeda dengan Bernardin dan Russel (1993 : 379) dalam Yeremias T. Keban (2004 : 192) mengartikan kinerja sebagai *therecord of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu.

Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai. Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai *performance*, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi,

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi (2005 : 175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi tersebut, *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* Tahun 2003 dalam Yeremias T. Keban (2004 : 193), juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

2. 2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Yeremias T. Keban (2004 : 203) untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut :

- a. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.
- b. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.
- c. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu biasa kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
- d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar. Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005 : 180), kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut :
 - a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.

- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi;
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Selanjutnya Yuwono dkk.dalam Hessel Nogi (2005 : 180) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky dalam Hessel Nogi (2005 : 180) mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut.
- b. Kualitas *input* atau material yang digunakan oleh organisasi.
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.

- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi.
- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut Atmosoeprapto, dalam Hessel Nogi (2005 : 181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Faktor eksternal, yang terdiri dari :
 - 1. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - 2. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.
 - 3. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
- b. Faktor internal, yang terdiri dari :
 - 1. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
 - 2. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.

3. Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
4. Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. Namun secara garis besarnya, faktor yang sangat dominan mempengaruhi kinerja organisasi adalah faktor internal (faktor yang datang dari dalam organisasi) dan faktor eksternal (faktor yang datang dari luar organisasi). Setiap organisasi akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik masing-masing sehingga permasalahan yang dihadapi juga cenderung berbeda tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi.

2.3. Penilaian Kinerja

Menurut Larry D. Stout dalam Hessel Nogi (2005 : 174) mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bastian (2001 : 330) dalam Hessel Nogi (2005 : 173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Secara

rinci, Bastian mengemukakan peranan penilaian pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
- b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya.
- d. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati.
- e. Menjadikannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu proses kegiatan organisasi.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi, Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu.

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 49) penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas

dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya memiliki *stakeholder* yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lain menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda.

Dan menurut Ndraha, Taliziduha.(1991: 32) Kinerja kepala desa dapat melakukan dimana :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

1.4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan/berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005:34, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah).

TaliziduhuNdraha dalam Soebroto (2001:45) memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu :

- 1. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- 2. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan.
- 3. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan.
- 4. Prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara.
- 5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Sedangkan Mely G. Tan dan Koentjaraningrat dalam Soebroto (2001:60), memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu :

1. Hasil usaha pembaharuan tersebut harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat.
2. Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.
3. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku di dalam masyarakat desa.

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka.

Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri Kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan kepada tujuan meningkatkan kapital dan kepentingan segolongan tertentu saja yang merugikan golongan masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah yang ada serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Seharusnya keberagaman potensi wilayah baik kondisi biofisik wilayah, kemampuan sumberdaya alam,

pertumbuhan penduduk, dan akses ke pasar yang berbeda menghendaki perlakuan ataupun kebijakan yang berbeda pula yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Kesalahan dalam pengaturan dan perancangan program-program pembangunan menyebabkan kegagalan proses pembangunan itu sendiri.

Keragaman wilayah pedesaan di Indonesia tergantung kepada tipologinya yang bervariasi, yang oleh Anwar (2005 :37), kebijakan pertanian dan pedesaan tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua keadaan wilayah yang masing-masing memiliki kekhasan dan sifat-sifat khusus yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi perkembangan dari wilayah yang bersangkutan yang secara konseptual tergantung kepada akses pasar dan biaya-biaya transaksi.

Kesenjangan spasial yang terjadi antar wilayah perkotaan yang bercorak industri dan jasa dengan wilayah pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian. Maka diperlukan terobosan dalam menyeimbangkan pembangunan yang berdampak pada pembangunan infrastruktur (fisik) desa, dan perekonomian rakyat pedesaan (non fisik).

Untuk itu Wresniwiro (2007:45), mengemukakan suatu konsep pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan menyeimbangkan pembangunan-kota yang dilakukan secara terpadu. Keseimbangan spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan pedesaan memperhatikan berbagai faktor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan: (1)pemerataan, (2) pertumbuhan, (3) keterkaitan, (4) keberimbangan, (5) kemandirian, dan (6) keberlanjutan.

Keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah pedesaan dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan pada ruang kosong tetapi kegiatan yang dilakukan pada tempat dimana sejumlah penduduk yang memiliki nilai-nilai tertentu menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Sehingga nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi swadaya dan pengelolaan sumberdaya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan. Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai entry point-nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi unggulan dimasing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan dapat segera terwujud.

Sebab kunci dari pembangunan yaitu kurangnya masyarakat yang masih tergolong kurang sejahtera dibidang perekonomian, dimana hal itu dikategorikan sebagai rakyat miskin. Dikarenakan prekenomian rakyat yang tidak memenuhi kebutuhan hidup dari segi sandang dan pangan. Dimana sebagian orang terkadang pembangunan diartikan adanya gedung megah. Padahal pembangunan itu ada dua segi yaitu pembangunan fisik dan non fisik. (Wresniwiro, 2007:58).

2.5. Kerangka Pikir

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan atau tingkat pencapaian hasil oleh

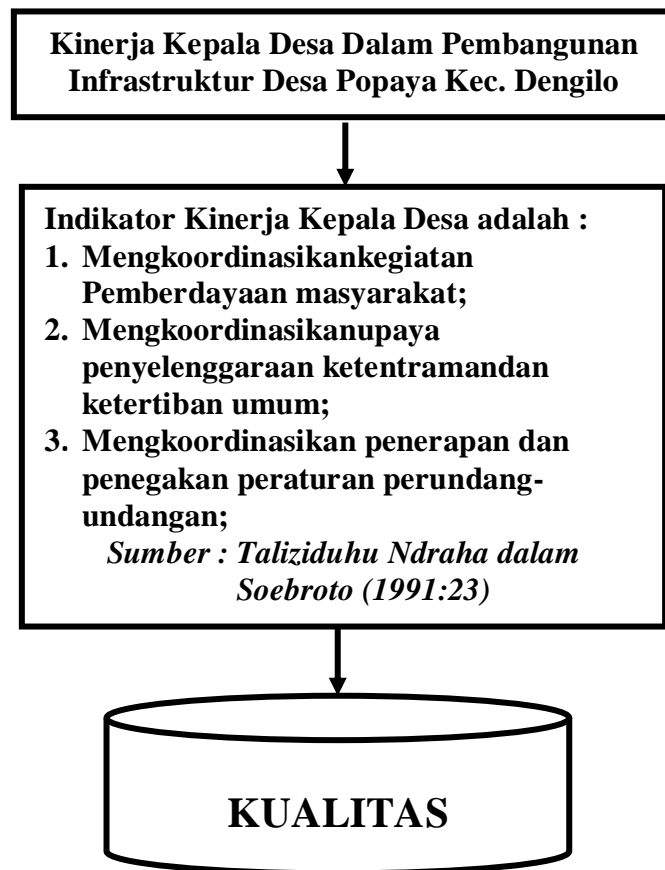
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, melalui tingkat, produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas yang diterapkan dalam rangka upaya mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam konteks lokus penelitian ini yaitu desa Popaya Kecamatan Dengilo, faktor kepemimpinan dan budaya cenderung mempengaruhi kinerja aparatur.

Kepemimpinan dalam konteks di atas adalah sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain, yang dilakukan oleh seseorang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan atau proses mempengaruhi orang, sehingga mereka berusaha dengan sukarela dan antusias ke arah tercapainya sasaran-sasaran kelompok. Sedangkan budaya dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman yang terinternalisasi ke dalam pikiran dan diaktualisasikan ke dalam sikap.

Kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja aparat adalah kepemimpinan yang memiliki etika yang baik, memotivasi serta memberikan informasi yang tepat kepada anggota kelompok/individu-individu dalam organisasi untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien, tidak hanya bekerja sesuai dengan imbalannya, tetapi diharapkan mampu bekerja lebih apa yang seharusnya dilakukan. Untuk itulah kinerja akan dilakukan untuk mengetahui pencapaian Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka pikir



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dari penelitian adalah Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dan waktu penelitian ini adalah \pm 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif kualitatif menggambarkan yaitu menggambarkan metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Ketepatan penentuan metode ini didasarkan pada pendapat Winarno Surachmad dalam Ridwan (2008:65), bahwa “aplikasi metode ini dimaksudkan untuk penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang ini”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nasution dalam Ridwan (2008:65) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variabel”.

2.3. Operasionalisasi Variabel

Yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel independen adalah evaluasi kinerja camat dan pembangunan infrastruktur sebagai variabel dependen. Penelitian ini diharapkan dapat membentuk penelitian untuk memahami dengan mudah dalam mengidentifikasi setiap variabel yang ada. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato antara lain:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

3.4. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang – orang yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman terhadap objek penelitian yang dilakukan antara lain adalah :

1. Kepala Desa Popaya Kecamatan Dengilo 1 orang
2. Sekretaris Desa Popaya 1 orang
3. Kaur-kaur 3 orang
4. Kepala dusun 4 orang

Jumlah Informan Penelitian	9 orang informan
----------------------------	------------------

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil wawancara dari informan serta hasil observasi.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui media yang sifanya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3.6. Teknik Pengumpulan data

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady (2001:54-73), bahwa dalam pengumpulan data terdiri dari, “Observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Melihat hal itu sehingga peneliti menggunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa cara anatara lain:

- a. Observasi yaitu, untuk melihat secara langsung dan mencari informasi yang ada kaitanya dengan penelitian.
- b. Wawancara yaitu, untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan melalui proses komunikasi dua arah.
- c. Daftar wawancara yaitu daftar pertanyaan dari peneliti kepada informan baik secara langsung atau tidak langsung.
- d. Dokumentasi yaitu, bentuk dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang lebih baik dalam arti mendekati kenyataan (objektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpulan data yang baik dan lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan handal (*reliabel*). Dan untuk itu dapat menyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang di gunakan itu valid dan handal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus di uji secara kualitatif dan menghasilkan data yang obyektif.

3.7. Analisis Data

Data yang didapatkan lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan berupa Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Desa Popaya terbentuk pada tahun 1846 atas prakarsa dan perjuangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh Pemuda. Pada saat itu ukuran desa sekitar $\pm 8.500 \text{ m}^2$ dengan jumlah Penduduk pada waktu itu 135 jiwa dan 40 kepala keluarga.

Dengan adanya perluasan wilayah dan ketambahan jumlah penduduk yang makin meningkat sehingga pada tahun 2003 telah mengadakan pemekaran desa yakni desa karya baru, kemudian pada tahun 2008 dimekarkan lagi desa Huta Moputi. Setelah dimekarkan pada tahun 2008 jumlah penduduk 2138 jiwa dan 462 kepala keluarga dengan jumlah dusun adalah 3 dusun. Sebagian besar penduduk memeluk agama islam dari suku gorontalo dan minahasa.

Mata pencaharian utama adalah petani sawah dan ladang. Luas sawah 65,75 Ha dan luas ladang 315 Ha. Dengan jumlah kelompok tani 24 kelompok dan petani ladang berjumlah 20 kelompok. Mata pencaharian lain yang digeluti masyarakat adalah perkebunan kelapa, peternakan sapi, dan pertukangan. Adanya potensi sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Sampai saat ini keharmonisan antar warga masyarakat dan sistem pemerintahan berjalan baik.

Desa Popaya pada Tahun 2019 telah mengadakan pemilihan Kepala desa , dimana calon yang terpilih sebagai Kepala desa sekarang yaitu : bapak **Anis Busura,S.Pd.I** untuk periode 2020 – 2026

Adapun batas-batas administrasi wilayah Desa Popaya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karya Baru dan Huta Moputi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Soginti;
- Sebelah barat berbatasan dengan Hutan Lindung;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemiri.

Fotografi desa adalah wilayah daratan.

Tabel : 4.1 Periode Kepemimpinan Kepala Desa Setelah Berdirinya Desa Popaya

No	Nama Kepala Desa	Periode	Ket
1	Bantalo Taliki	1940 – 1946	Almarhum
2	Dauda Haluta	1946 – 1948	Almarhum
3	Datu Busura	1949 – 1966	Almarhum
4	Abd. Rahman Abas	1966 – 1989	Almarhum
5	Alex Paudi	1989 – 1990	PLH/Almarhum
6	Syarifudin Ladiku	1990 - 2000	Almarhum
7	Badarudin Rauf	2000 – 2006	Masih Hidup
8	Syarifudin Mohamad	2006 – 2007	PLH/Masih Hidup
9	Badarudin Rauf	2007 s/d 2013	Masih Hidup
10	Karim Adam	2014 s/d 2019	Masih Hidup
11	Anis Busura,S.Pd.I	2020 s/d Sekarang	Masih Hidup

Sumber Data : Kantor Desa Popaya 2021

Tabel : 4.2 Sejarah Pembangunan Desa

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	2014	Pembuatan Drainase	Swakelola
2	2014	Pembangunan Rumah Sehat	Swakelola
3	2014	Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pustu	Pihak Ke 3
4	2014	Perbaikan Sarana Prasarana Pasar Dengilo	Pihak Ke 3
5	2014	Penataan Halaman Pasar Dengilo	Pihak Ke 3
6	2014	Lanjutan Pembangunan Panggung	Swakelola
7	2015	Pembangunan Batas Wilayah Desa (Gapura)	Swakelola
8	2015	Rehab Kamar Mandi	Swakelola
9	2015	Pembangunan Rumah Sehat	Swakelola
10	2015	Lanjutan Pembangunan Sekretariat BPD	Swakelola
11	2015	Pembangunan Saluran Drainase	Swakelola
12	2015	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	Pihak Ke 3
13	2015	Pembangunan Bak sampah	Swakelola
14	2015	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Desa	Swakelola
15	2015	Pembangunan Kamar Mandi	Swakelola
16	2016	Lanjutan Pembangunan Batas Desa	Swakelola
17	2016	Pembangunan Rumah Sehat 3 Unit	Swakelola
18	2016	Pembangunan Drainase	Swakelola
19	2016	Pembangunan Plat Deker 3 Unit	Swakelola
20	2016	Pembangunan Jamban 8 Unit	Swakelola
21	2016	Pembangunan Aula Kantor Camat Dengilo	Pihak Ke 3
22	2016	Pembangunan Ruangan PLKB Dengilo	Pihak Ke 3
23	2016	Pembangunan Rehabilitas /Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pihak Ke 3
24	2017	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Pihak Ke 3
25	2017	Pembangunan Drainase Dusun Mopanggelo	Swakelola
26	2017	Pembangunan Drainase Dusun Limbato	Swakelola
27	2017	Pembangunan Plat Decker	Swakelola
28	2017	Pembangunan Sekolah Paud Mawar Lestari	Swakelola
29	2017	Pemnagunan Pagar dan Halaman Tunas Bangsa	Swakelola
30	2017	Pembangunan Rumah Sehat	Swakelola
31	2017	Pembangunan Jamban	Swakelola
32	2017	Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK	Pihak Ke 3
33	2018	Pemagaran Pustu Mawar	Swakelola
34	2018	Pemgaran Sekolah TK Al Istiqlal	Swakelola

35	2018	Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Dengilo	Pihak Ke 3
36	2018	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija (Pembuatan Embung Pertanian)	Pihak Ke 3
37	2018	Pemeliharaan Lapangan	Swakelola
38	2018	Pembangunan Rumah Layak Huni	Swakelola
39	2018	Pembangunan Tempat Penyimpanan Alsintan	Pihak Ke 3
40	2018	Penataan /Pembutan Taman dan Pagar Kantor Camat Dengilo	Pihak Ke 3
41	2018	Pembangunan Kandang Ayam Petelur	Swakelola
42	2018	Pembangunan Rumah Bibit Palawija	Pihak Ke 3
43	2018	Pembangunan Rumah Layak Huni	Swakelola

Sumber Data : Kantor Desa Popaya 2021

Tabel : 4.3 Keadaan Jumlah Penduduk

No	Uraian	Desa	Dusun Mopanggelo	Dusun Tugu Pancasila	Dusun Limbato
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa
2	Penduduk laki-laki	943 Jiwa	315 Jiwa	375 Jiwa	253 Jiwa
3	Penduduk perempuan	1.002 Jiwa	371 Jiwa	374 Jiwa	257 Jiwa
4	Penduduk agama islam	1.940 Jiwa	686 Jiwa	749 Jiwa	505 Jiwa
5	Penduduk agama Kristen	5 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	5 Jiwa
6	Penduduk agama Hindu	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa
7	Penduduk pendidikan SD	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa
8	Penduduk pendidikan SMP	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa
9	Penduduk pendidikan SMA	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa
10	Penduduk pendidikan Perguruan Tinggi	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Popaya 2021

1.1.2. Visi dan Misi Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Adapun visi dan misi desa popaya kecamatan dengilo kabupaten pohuwato di uraikan sebagai berikut :

1. Visi Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Dalam periode 2020 - 2026, Visi Pembangunan Desa Popaya adalah “Terbangunnya Pembangunan yang Merata di Segala Bidang”, sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Desa Popaya secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Desa Popaya lebih sejahtera

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci

Pada Visi Popaya 2020 - 2026 terdapat 1 (satu) kalimat kunci yaitu Rakyat Desa Popaya yang Religius. Kalimat. “Rakyat Desa Popaya yang Religius adalah merupakan refleksi dari Pencegahan Paham Radikal, Mengurangi masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta ditemukannya jati diri masyarakat Desa Popaya.

Religius : masyarakat yang Sikap dan Perilaku yang Patuh Dalam Melaksanakan Ajaran Agama, Toleran terhadap Pelaksanaan Ibadah Agama Lain dan Hidup Rukun dengan Pemeluk Agama Lain

2. Misi Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Masyarakat yang Religius”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Desa Popaya 2020 - 2026” sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kapasitas Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat.
2. Melaksanakan Pembangunan yang Merata disegala Bidang.
3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan di Bidang Pertanian, Peternakan dan Usaha Industri Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan Pemerintah dan Kelembagaan Sosial Masyarakat.
5. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa di Lingkungan Masing - masing.
6. Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur dan Berwibawadengan pengambilan Keputusan yang cepat dan Tepat.
7. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Baik Formal maupun Non Formal Melalui Program Gerakan Kampung Cerdas.

1.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Popaya

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi desa Popaya kecamatan Dengilo kabupaten pohuwato dijabarkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Kepala Desa | : Anis Busura, S.Pdi |
| 2. Sekertaris desa | : Fendi Puluhulawa,. SE |
| 3. Kasie Pemerintahan | : Harpin Hamid, S.Pd |
| 4. Kasie Kesejahteraan | : Riski Koniyo |
| 5. Kasie Pelayanan | : Nartin Dau, S.IP |
| 6. Kaur Tata Usaha dan Umum | : Susanti Imon |
| 7. Kaur Keuangan | : Misran Abuniyo |

- 8. Kaur Perencanaan : Hendrian Husain, S.Kom
- 9. Kepala Dusun Limbato : Rahman Padunggala
- 10. Kepala Dusun Tugu Pancasila : Nasir Dunggio
- 11. Kadus Mopanggelo : Fajrun Adam

1.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pemerintah Desa Popaya

KEPALA DESA

Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa bersama BPD.

Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Wewenang Kepala Desa :

- memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- membina kehidupan masyarakat Desa;
- membina perekonomian Desa;
- mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala Desa adalah :

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- melaksanakan kehidupan demokrasi;
- melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Larangan kepala Desa :

- menjadi pengurus partai politik;
- merangkap jabatan sebagai Pimpinan/Anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan ;
- merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD;
- terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden atau pemilihan kepala Daerah;
- merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menyalahgunakan wewenang; dan
- melanggar sumpah/janji jabatan.

a. Perangkat Desa

SEKRETARIAT DESA

1. Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah Desa yang dipimpin Sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala Desa.

4. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi pertanahan/keagrariaan dan kependudukan;
- Pelaksanaan administrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan.

KEPALA SEKSI

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi :
 - Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
 - Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,

politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian dengan judul Kinerja Kepala Desa Dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat di deskripsikan sebagai berikut :

4.2.1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa:

Koordinasi kepala desa sangat berpengaruh penting dalam pembangunan desa agar lebih maju dan mandiri, serta dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat berpegaruh pada terciptanya masyarakat yang saling menghargai serta tolong- menolong. Dalam pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat sebagai bentuk upaya mempermudah pembangunan di desa melalui penyediaan

sarana dan prasarana yang terfokus untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri, dan sebagai bentuk upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah agar menjadi lebih kokoh dan efektif. Untuk mewujudkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat perlu adanya dukungan dari pihak pengelolaan pembangunan yang partisipatif pada tatanan pemerintah yang jujur, bertanggung jawab, terbuka, dan demokrasi. Dalam pembahasan ini peneliti mencermati bagaimana Kegagalan atau keberhasilan dalam peningkatan pembangunan di desa dapat terlaksana, karena hal ini ditentukan dari kinerja kepala desa, sejauh mana kepala desa dalam menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, merencanakan serta berkomunikasi baik kepada masyarakat desa. Hal ini dapat ditelusuri melalui hasil wawancara dengan informan sebagai Kepala Dusun, bapak ND, bahwa :

”Kepala Desa Popaya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa selama ini saya lihat tidak menjalankan secara sendiri, namun masih ada koordinasi baik dengan aparat desa popaya maupun dengan pengurus BPD dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur di desa popaya , terutama dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Karena melalui kegiatan pemberdayaan tersebut akan memberi kesan bahwa kepala desa melibatkan langsung masyarakat sebagai potensi yang mendukung pembangunan di desa kami”

Pernyataan yang sama pula disampaikan oleh informan yang lain yakni bapak HH, Kaur Perencanaan, dikatakan sebagai berikut :

“Saya memperhatikan selama ini Kepala Desa Popaya dalam melaksanakan pembangunan di Desa kami senantiasa melakukan koordinasi sebelum melaksanakan pembangunan tersebut, ini saya tau karena kami masyarakat diundang kalau ada rapat pembahasan pelaksanaan pembangunan terutama dengan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan infrastruktur tersebut. Pemberdayaan masyarakat sekitar yang lebih terpenting karena pelibatan masyarakat menjadi sebuah bentuk kepedulian pemerintah desa popaya dalam meningkatkan partisipasi dan

pengawan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama agar tercapai hasil yang sesuai harapa.”

Dari pernyataan kedua informan tersebut di atas, maka saya sebagai penulis dalam penelitian ini dapat memberikan penjelasan bahwa, dapal melaksanakan pembangaunan infrastruktur di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, bahwa sangat penting dilakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat utuk melibatkan langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktursehingga pelibatan masyarakat menjadi motivasi agar tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan infrasrstruktur kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat informan yang berikut, ibu H.P, Kasie Pemerintahan,dinyatakan bahwa :

“Untuk saat ini saya memperhatikan kepala desa popaya ini sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur di desa ini, melakukan diskusi-diskusi yang bersifat koordinatif, artinya membicarakan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, dengan maksud agar dalam menjalankan pembangunan nanti tidak mengalami kendala maupun masalah yang ditimbulkan karena tidak terjalannya koordinasi yang baik dari semua unsur pemangku kepentingan yang ada di desa kami ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa popaya.”

Dikofirmasi penulis kepada informan yang lain terkait dengan indikator mengkoordinasikan dalam pembangunan infrastruktur di desa Popaya, sebagaimana dinyatakan oleh bapak PA, sebagai kepala Dusun, bahwa :

“Menurut pendapat saya utnuk pembangunan infrastruktur di desa popaya ini telah melibatkan secara penuh masyarakat setempat, karena ini akan memberikan beberapa dampak, seperti keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut.”

Informan lainnya yaitu Kaur Umum, bapak, SI, mengatakan bahwa :

“Kepala desa ini semangat dalam memberi motivasi masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik di mata masyarakat, Kepemimpinan kepala desa sangat jelas terlihat terhadap suksesnya pembangunan ada pula kualitas kinerja kepala desa berkoordinasi aktif dengan perangkat Desa dalam setiap Pelaksanaan pembangunan.”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat diberikan penjelasan untuk indikator kinerja melalui mengkoordinasikan bahwa pada kenyataannya kepala Desa Popaya dalam rangka menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, telah menjalankan fungsi koordinasi dengan semua unsur maupun pihak yang berkenaan langsung dengan pembangunan di maksud, baik koordinasi dengan aparat desa popaya maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat, Adapun bentuk koordinasinya sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing pemangku kepentingan. Bahkan upaya Kepala Desa dalam mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tersebut dapat dimaknai menjadi motivasi karena bagaimanapun untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut agar memudahkan para pemangku kepentingan agar selalu mengedepankan koordinasi sehingga kegiatan tersebut dapat menghasilkan hal yang baik kepada semua pihak.

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan akan memperjelas suatu program dan kegiatan yang dilakukan. Juga membangun landasan berfikir yang jelas untuk pengukuran pencapaian sasaran pembangunan.

4.2.2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di suatu desa sangat penting untuk dilakukan hal ini dalam rangka untuk mengantisipasi adanya

perselisihan dari anggota masyarakat yang berujung pada hal – hal yang menghambat pembangunan di desa tersebut, dan ini merupakan tanggung jawab penuh dari kepala desa selaku penguasa di desa itu, maka untuk mengetahui lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian yakni tentang kinerja kepala desa dalam Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di desa popaya berikut ini kutipan wawancaranya.

Informan sebagai Kaur Umum, WA, yang menyatakan bahwa kepala desa popaya dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan pembangunan di desa popaya adalah sebagai berikut :

“ Kepala Desa telah berupaya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam pembangunan infrastruktur bermaksud agar semua proses pembangunan yang dilakukan agar tidak menemui masalah, terutama pelaksanaan pembangunan ketertiban dalam penataan wilayah pembangunan di desa, kepala desa ini berusaha agar selalu membicarakan dengan semua usur yang ada di desa seperti, trantib, anggota Binmas dan stakeholder yang lainnya, dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung, yang paling penting lagi adalah masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan tersebut merasa aman dan nyaman.”

Hal yang sama pula disampaikan informan lainnya Dalam hasil wawancara penulis dengan aparat Desa Popaya, ND, menyatakan bahwa :

“Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Popaya Kecamatan Dengilo, saya melihat kepala desa berusaha untuk selalu menjalin komunikasi dengan seluruh unsur yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban terutama kepada petugas keamanan seperti Bimnas, berkomunikasi dengan anggota keamanan yang ada di wilayah kecamatan Dengilo yakni Polsek setempat, agar proses pelaksanaan pembangunan berjalan sebaik mungkin,

Dari pendapat beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya

kepala Desa Popaya dalam rangka meningkatkan kinerja melalui pembangunan infrastruktur selalu memperhatikan bagaimana pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan atau ketidaknyaman di tingkat masyarakat terutama masyarakat yang berada disekitar pembangunan merasa aman dan nyaman dari dampak pembangunan tersebut. Masyarakat merasa berkewajiban pula dalam menjaga kesinambungan hasil-hasil pembangunan yang bermaksud membantu masyarakat dalam aspek pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab masyarakat punya peran yang penting dalam menjaga serta melestarikan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

Pemerintah Desa Popaya senantiasa membangun koordinasi dengan pihak keamana terkait dengan maksud agar ketertiban dan keamanan di desa Popaya dapab berjalan dengan baik dan senantiasa terkendali sehingga ketertiban senantiasa terjaga dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.

4.2.3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pada indikator ini Kepala Desa Popaya dalam melakukakan kordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan terutama dalam penerapan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku terutama peraturan yang ditempuh sebelum melakukan pembangunan di Desa. Koordinasi yang dilakukan baik dengan organisasi perangkat daerah yang terkait maupun dengan satuan kerja di Desa. Berdasarkan peraturan bahwa Pelaksanaan pembangunan di awali dengan satu kegiatan yang disebut Musyawarah rencana

pembangunan desa (Musrenbangdes) sesuai dengan amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 (SPPN). Dalam kegiatan Musrenbangdes tersebut membahas berbagai perencanaan pembangunan yang diusulkan berasal dari semua unsur perwakilan masyarakat di Desa tersebut. Adapun Pelaksanaan pembangunan di Desa Popaya Kecamatan Dengilo harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan sesuai maka penulis melakukan pengambilan data serta informasi terkait dengan indikator penelitian.

Selanjutnya dilakukan wawancara kepada informan sebagai berikut :

“Kasie Pemerintahan Desa Popaya, HH, mengatakan bahwa : “ Upaya kepala Desa dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperunda-undangan sering dilakukan dengan baik, misalkan yang kami lakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa setiap pelaksanaan pembangunan senantiasa harus diawali dengan sosialisasi agar semua masyarakat tau bahwa akan ada pemabngunan di desa ini, lebih-lebih di tempat dimana pembangunan itu akan dilakukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada masyarakat terutama yang masyarakat yang bertempat tinggal dilokasi langsung pembangunan tersebut. Sehingga apabila ada yang merasa keberatan dengan hal itu maka sescepatnya dapat diselesaikan sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan. “

Informan lainnya, Bapak PA, adalah salah satu Kadus, di Desa Popaya mengatakan bahwa :

“ Seperti yang saya perhatikan selama ini, kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa ini, maksudnya desa Popaya, maka Kepala Desa so sibuk poli aati,,karena pasti poli medapa protes dari masyarakat terutama yang ada disekitar lokasi pembangunan, dorang motanya – tanya pembangunan apa poli ini, baru sapa-sapa yang mo bakarja di proyek itu, karna biasaya torang tidak dijadikan tenaga kerja kalau ada pekerjaan pembangunan, makanya saya liat masyarakat juga harus dilibatkan mereka sebagai pekerja atau pembantu bass begitu.Dorang juga mengiri karna bo orang dari luar desa ini yang jadi pekerjaannya sedang dorang juga perlu bakarja olo, jadi itu walaupun kepala desa sudah disampaikan tapi masih sering begitu,- “

Dikonfirmasi kepada informan lainnya yakni SI sebagai Kaur Umum, di katakan bahwa :

“ Dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Popaya ini memang kepala desa sebelum melakukan pembangunan selalu diawali dengan pembahasan melalui musyawarah perencanaan Desa, karena sesuai aturannya harus begitu, tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalkan status tanah tempat pembangunan sebagai lokasi pembangunan harus jelas tidak ada masalah atau jangan sampai yang punya tanah keberatan dengan pembangunan tersebut. Namun kami liat kepala desa sudah sering menjaga-jaga hal itu agar tidak terjadi sehingga di sosialisasikan kepada masyarakat sebelum pembangunan di laksanakan.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat di jelaskan bahwa upaya pemerintah desa popaya dalam rangka melaksanakan pembangunan senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait terutama yang terkait dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga terjaminnya sebelum proyek pembangunan itu dilaksanakan, sebab menjaga akan timbul hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan akan yang muncul saat melaksanakan pembangunan tersebut dilaksanakan. Koordinasi yang dibangun pemerintah desa dalam hal ini kepala desa popaya menjadi suatu dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan pembangunan di desa popaya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kaur Perencanaan, yakni Bapak Hendra Husain, yang mengatakan bahwa :

“ Kepala Desa dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Popaya Kecamatan Dengilo selalu berusaha mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terutama dalam menjalankan mekanisme yang berdasarkan peraturan pelaksanaan pembangunan sehingga pak Kades juga tidak salah menjalankan program pembangunan di desanya. Begitu yang dilakukannya agar tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Koordinasi yang terkait dengan penegakan aturan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh kepala desa, contoh program

yang akan dilaksanakan harusnya di bahas dulu melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh semua unsur yang terkait dengan pembangunan. “

Dari hasil wawancara di atas dapat diberikan uraian bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur dapat digambarkan bahwa walaupun kepala desa sebagai penyelenggaran serta penanggungjawab pemerintahan dan pembangunan di desa, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan maupun peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam pelaksanaan perencanaan yang mengawali kegiatan pemerintahan desa dalam program pembangunan di desa dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait agar terwujud kesamaan persepsi serta memadukan atau mengintegrasikan antara harapan pemerintah dengan harapan masyarakat melalui dokumen perencanaan pembangunan.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian tentang Kinerja Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut berdasarkan indikator penelitian yakni sebagai berikut :

4.3.1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur yang di deskripsikan melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa popaya di pandang perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa koordinasi yang diaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan yang dimaknai sebagai sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga. Pernyataan – pernyataan pada

hasil penelitian dapat penulis deskripsikan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur sudah terlihat baik, namun tentu masih perlu di tingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dimana pemberdayaan yang di maknai bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan bertanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Masyarakat bukan sekedar diberikan layanan melalui penyediaan pembangunan infrastruktur, namun di arahkan lebih banyak memandirikan mereka dalam semua aspek pembangunan. Penyediaan infrastruktur yang bermacam-macam tersebut harus di tunjang ataupun di dukung dengan penguatan kelembagaan organisasi yang tertentu di masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam menempatkan peran-peran masyarakat dalam pembangunan di desa terutama di desa popaya kecamatan dengilo kabupaten pohuwato.

Keterlibatan masyarakat secara sepenuhnya menjadi suatu pembelajaran bagi mereka bahwa pemerintah memberikan sebagian tanggung jawab secara tidak langsung bagi masyarakat bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama dari semua unsur yang ada di Desa Popaya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Proses Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal yang dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kegiatan bersama sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian

secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Pemberdayaan yang dimaknai sebagai implikasi dari strategi pembangunan harus merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan mutu hidup masyarakat, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya. Pembangunan infrastruktur di Desa Popaya sudah menjadi perhatian pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat, pembangunan yang memiliki tujuan mendasar misalkan dalam pembangunan pertanian mempunyai tujuan pemberdayaan demi terwujudnya perbaikan teknis bertani, perbaikan usaha tani dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya.

4.3.2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pada indikator penelitian ini dapat di deskripsikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Desa Popaya sangat nampak hal ini di tandai dengan usaha yang dilakukan kepala Desa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan usaha ketertiban serta keteraman masyarakat desa popaya kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

Usaha yang dilakukan memperoleh dukungan dari semua aparat bersama stakeholders yang ada di desa tersebut. Adapun unsur yang dilibatkan langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti anggota Kantibmas, anggota Binmas dalam rangka menjaga serta memberikan rasa aman dan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Popaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kepala Desa Popaya berusaha membangun

komunikasi serta koordinasi dengan semua unsur yang ada di Desa sehingga nampaknya pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar dan terkendali tanpa masalah yang terlalu urgen sekali terjadi, masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan terutama masyarakat petani yang merasa terbantu dengan pembangunan infrastruktur merasa sangat membutuhkan misalkan akses jalan petani. Dengan tersedianya akses jalan pertanian sangat membantu serta memudahkan para petani untuk mendistribusikan maupun memindahkan hasil panen ketempat penampungan sangat mudah melakukan itu. Pembangunan infrastruktur di Desa Popaya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Akses yang tersedia menjadi sarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam menjelajahi lahan perkebunan maupun pertanian lainnya.

Keteraturan dan ketertiban yang dirasakan masyarakat di Desa Popaya yang di bawah koordinasi Kepala Desa dengan harapan agar keadaan masyarakat terbangun kondusif. Semua ini merupakan pengharapan pemerintah serta masyarakat yang ada di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. Tujuan semua itu dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.

Usaha dari pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Popaya Kecamatan Dengilo dalam mewujudkan keadaan tentram dan ketertiban umum dalam melaksanakan pembangunan mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat walaupun tidak secara langsung mereka terlibat dalam kegiatan tersebut, namun dengan hadirnya pemerintah dalam melakukan koordinasi dalam setiap

pelaksanaan pembangunan d asakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab bersama – sama. Masyarakat merasa bertanggungjawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

4.3.3.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pada Indikator mengkoordinasikan Penerapan peraturan dan penegakan perundang-undangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Popaya oleh pemerintah Desa sangat mendapat perhatian yang cukup dari semua unsur di dalam pemerintah Desa Popaya.

Usaha Kepala Desa dalam menerapkan peraturan dalam menjalankan pembangunan di Desa Popaya terlebih khusus pembangunan infrastruktur, menerapkan dengan baik, sejak mulai pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaannya Kepala Desa berusaha mengakomodir melalui peraturan serta mekanisme yang disyaratkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Koordinasi yang dilakukan dengan seluruh unsur terkait dengan pelaksanaan perencanaan pemabangunan infrastruktur menjadi perhatian utama Kepala Desa.

Hal itu dilakukan dengan memperhatikan amanah dari sistem pelaksnaan pembangunan nasional (SPPN) 2004, Sebelum melaksanakan pembangunan senantiasa diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang menghadirkan partisipan dari berbagai perwakilan unsur yang ada di Desa Popaya tersebut. Kepala Desa bersama aparat Desa dalam

rangka kegiatan ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pembangunan harus diawali dengan sosialisasi semacam ini agar masyarakat dapat menggunakan haknya memberikan partisipasi pemikiran maupun ide yang membantu kelancaran pelaksanaan musyawarah.

Usaha yang dilakukan dalam menerapkan aturan dalam pelaksanaan pembangunan tidak boleh hanya bersifat sepihak, namun harus melibatkan semua unsur stakeholder terutam para pemangku kepentingan yang memahami peraturan serta ketentuan yang berlaku. Hal ini memudahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa karena telah mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat terutama masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan tersebut.

Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa Popaya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan dalam penerapan dan penegakan peraturan yang berlaku, hal ini menghindari kekacauan pada saat pelaksanaan pembangunan. Koordinasi yang dilakukan sangat berkaitan dengan terwujudnya kondisi yang mendukung terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang baik dan kondusif yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di bab sebelumnya tentang Kinerja kepala desa Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Popaya maka dapat di berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Kepala Desa Popaya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan melalui koordinasi pemberdayaan masyarakat menunjukkan telah melalui pelibatan masyarakat baik dalam proses awal kegiatan maupun akhir kegiatan pembangunan. Pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pemeliharaan proyek kemasyarakatan yang telah berhasil dikoordinasikan oleh kepala Desa popaya kecamatan Dengilo masih perlu ditingkatkan dengan lebih banyak melibatkan masyarakat desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.
2. Kinerja Kepala Desa dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keteraman dan ketertiban Umum dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa telah melakukan melalui pendekatan komunikasi dengan semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur terutama yang terkait langsung dengan kegiatan dimaksud yakni Satuan kerja, bidang Kantibmas serta elemen keamanan yang ada di Desa Popaya yakni Binmas dan bagian Tranti Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

3. Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur melalui koordinasi penerapan dan penegakan peraturan, dimana Kepala desa telah berusaha sedapat mungkin dalam pelaksanaan pembangunan tersebut senantiasa melakukan dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan, Upaya yang terpenting telah dilakukan melalui proses awal kegiatan melalui usaha musyawarah Desa yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang berdasarkan Remnagunan Nasional tahun 2004. Mekanisme yang dilaksanakan mendapatkan perhatian semua unsur masyarakat yang di hadirkan dalam kegiatan musyawarah sehingga menghasilkan perencanaan yang berasal dari usulan masyarakat yang dibutuhkan bukan hanya kaerena kepentingan orang perorang saja. Hal ini masih harus di tingkatkan pada masa –masa yang akan datang sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Popaya benar-benar di rasakan manfaatnya.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian serta kesimpulan penelitian maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kinerja Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Popaya sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang melalui pelibatan secara komprehensif masyarakat terlebih unsur terkait dengan kegiatan tersebut.
2. Perlu adanya usaha kepala Desa dalam peningkatan partisipasi aktif

masyarakat Desa Popaya dalam pembangunan Infrastruktur yang cenderung memperhatikan pemberdayaan masyarakat yang secara sadar atas kemauan sendiri di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Dwiyanto, Agus, 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Hamdi Muchlis, 2002. *Bungan Rampai Pemerintahan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Handoko H, 2000. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BFFEYogyakarta.
- Harbani Pasolong, 2008. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Hendra, J.P., 2002, *Organisasi Publik, (Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta)* , Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana MAPUGM.
- Henry. S, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, Supardan Modeong (1999). *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineke Cipta
- Irawan, P.1997. *Analisis Kinerja: Panduan Praktis Untuk Menganalisis Kinerja Organisasi, Kinerja Proses dan Kinerja Pegawai*, LAN RI, Jakarta.
- Nasution, S, 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, S, 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Ndraha, Talizuduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Osborne, David & Ted Gaebler. 1996. *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, The Addison Wesley Publishing Company Inc.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa
Popaya Kec. Dengilo Kab. Pohuwato

A. Identitas Peneliti :

Nama : Rostin Detu
NIM : S2115176
Jurusan / Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Ichsan Gorontalo

B. Identitas Informan

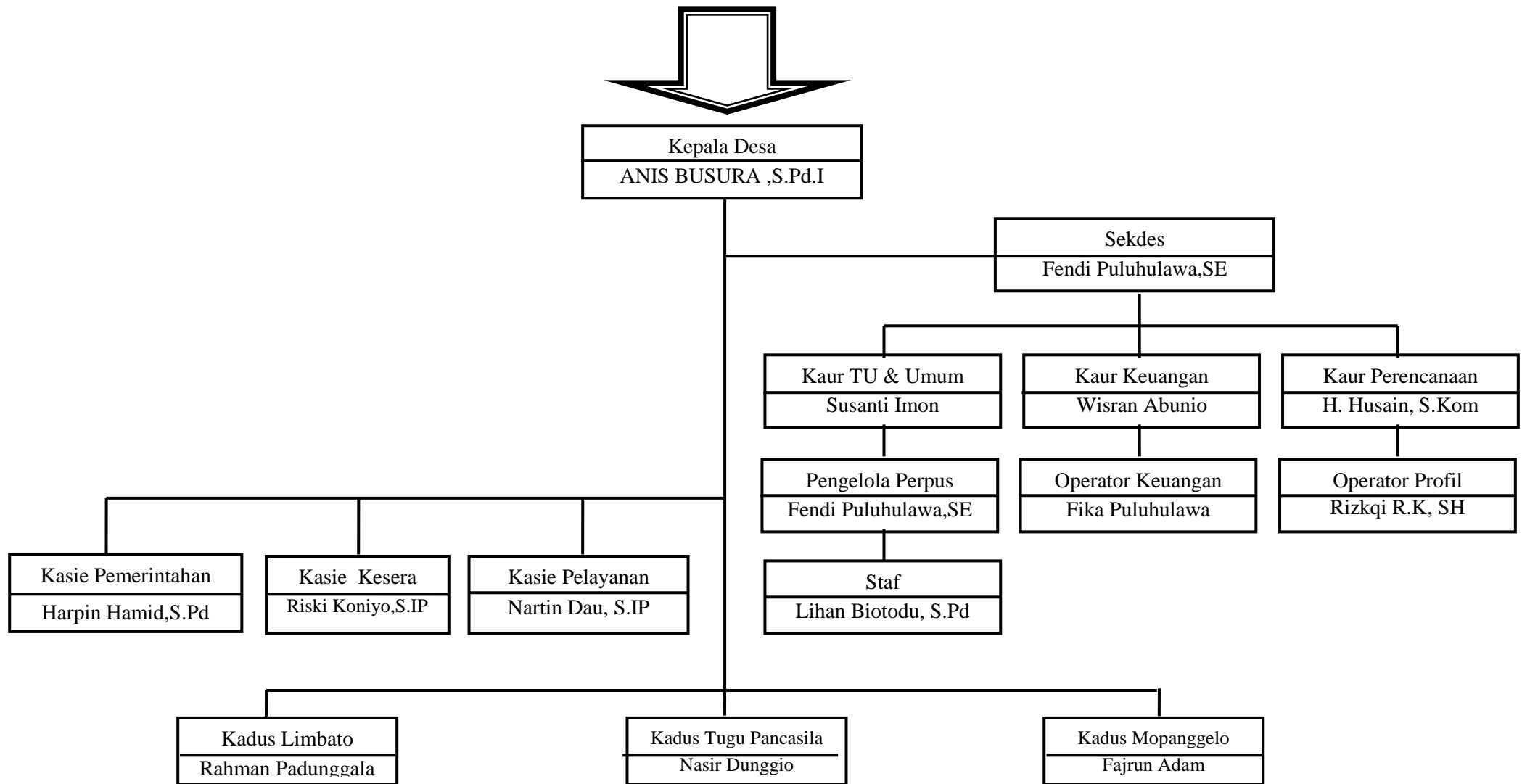
Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Jabatan / Pekerjaan :
Pendidikan :
Alamat :

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Popaya di lihat dari mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa?
2. Sejauh Mana Kinerja Kepala Desa Popaya Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Keterbipan Umum.
3. bagaimana kinerja kepala desa dapat mengkoordinasikan peraturan perundangan undangan

4. Bagaimana pembangunan infrastruktur masyarakat desa popaya dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
5. Bagaimana Kinerja Kepala Desa Popaya Selama Ia Menjabat...??
6. Bagaimana peran kepala desa saat di beri tugas untuk pembinaan masyarakat desa?

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA POPAYA KECAMATAN DENGILU KABUPATEN POHUWATO



KEPALA DESA POPAYA

TTD

ANIS BUSURA ,S.Pd.I

**FOTO VISUAL PELAKSANAAN WAWANCARA
DENGAN INFORMAN PENELITIAN DI DESA POPAYA
KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHUWATO**











**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1098/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ROSTIN DETU
NIM : S2115176
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI DESA POPAYA KEC.
DENGILO KAB. POHUWATO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

S2115176

SKRIPSI_ROSTIN DETU_S2115176_Kinerja Kepala Desa Dalam P...

Sources Overview

29% OVERALL SIMILARITY		
1	e-jurnal.unisda.ac.id INTERNET	11%
2	www.scribd.com INTERNET	7%
3	ejournal.unsrat.ac.id INTERNET	3%
4	pasca.unhas.ac.id INTERNET	2%
5	edoc.pub INTERNET	1%
6	id.123dok.com INTERNET	1%
7	repositori.kemdikbud.go.id INTERNET	<1%
8	mukmin1984.files.wordpress.com INTERNET	<1%
9	docobook.com INTERNET	<1%
10	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	<1%
11	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
12	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
13	dedidekme.blogspot.com INTERNET	<1%
14	media.neliti.com INTERNET	<1%
15	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%
16	123dok.com INTERNET	<1%

17

text-id.123dok.com
INTERNET

<1%

18

www.appptma.org
INTERNET

<1%

Excluded search repositories:
Submitted Works

Excluded from document:
Bibliography
Quotes
Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:
None

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Rostin Detu
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nim	: S.2115176
Tempat Tanggal lahir	: Popaya, 10 Oktober 1994
Agama	: Islam
Angkatan	: 2017
Jurusan/Prog.Studi	: Ilmu Pemerintahan
Status	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kab.Pohuwato



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- ✚ SDN Papaya Tahun 2007
- ✚ SMP Neg. 1 Dengilo Tahun 2009
- ✚ SMK Neg. 1 Dengilo Tahun 2013
- ✚ Strata satu (S1) Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3780/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KEPALA DESA POPAYA

di,-

TEMPAT

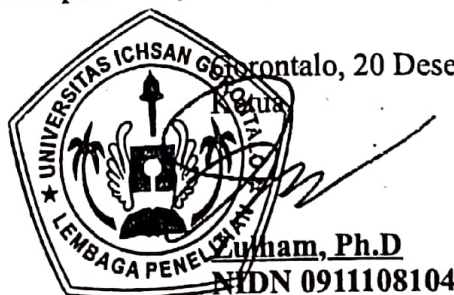
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rostin Detu
NIM : S2115176
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DESA POPAYA KECAMATAN DENGILLO KABUPATEN
POHUWATO
Judul Penelitian : KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA POPAYA KECAMATAN DENGILLO
KABUPATEN POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

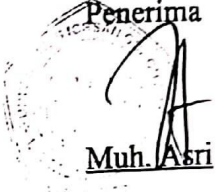
+

KWITANSI

Nomor : 3780/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021
Nama : Rostin Detu
NIM : S2115176
Sudah diterima dari : Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo
Uang Sejumlah : Rp. 150.000, -
Untuk Pembayaran : Surat Izin Penelitian
Terbilang : Seratus lima puluh ribu Rupiah

Gorontalo, 20 Desember 2021

Penerima


Muh. Asri

Terima Kasih

* Harap dibawa pada saat mengurus berkas ke Lembaga Penelitian